

## **KEWENANGAN DESA – KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA - DAFTAR**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 165, BD. 2016/NO.1 : 15 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi Desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; serta mekanisme penetapan kewenangan desa.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2016.

## **PEMBERNTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA – TATA CARA**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 2, BD. 2016/NO.166 : 17 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat sersuai kebutuhan dan potensi Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan BUMDesa tata cara pembentukan, Hak dan Kewajiban; Pengelolaan yang meliputi Organisasi dan Kepengurusan, Tugas dan Kewenangan, Jenis Usaha dan Permodalan, Bagi Hasil dan Rugi, Kerjasama, Laporan Pertanggungjawaban; Administrasi; serta Pembinaan dan Pengawasan
- CATATAN :**
- BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan;  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2015.

## **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA – PEDOMAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 3, BD. 2015/NO.167 : 13 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PRIORITAS TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu diatur lebih lanjut pedoman teknisnya.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000;UU Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang antara lain mencakup tujuan dan prinsip, prioritas penggunaan; serta Pembinaan dan Pengawasan dan Partisipan Masyarakat.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2015.
  - Lampiran 20 Hal.

## **PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – INSENTIF**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 4, BD. 2016/NO.168 : 8 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu meningkatkan kesejahteraan lewat penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga sehingga Turut meningkatkan semangat kerja.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif RT dan RW yang meliputi maksud dan tujuan, sumber dan besaran, mekanisme

penyaluran; pertanggungjawaban, serta tugas dan kewajiban.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Januari 2016.
  - Lampiran 7 Hal.

## **STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 5, BD. 2015/NO. 169 : 4 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Penyusunan dan pelaksanaan APBDesa harus didasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi pemerintah Desa dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, sehingga perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang No 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah Nomor 22 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Desa yang antara lain meliputi harga barang-barang, serta standar harga jasa yang meliputi honorarium/insentif, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2016.
  - Lampiran 65 Hal.

## **DANA DESA – PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 06, BD. 2016/NO.170 : 9 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu diatur tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan dana desa di dalam Peraturan Bupati.
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan dana desa, perhitungan alokasi formula pembagian dana desa, pengelolaan dana desa yang meliputi penyaluran pencairan dan penatausahaan, pelaporan dan sanksi.



- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2016.  
Lampiran 16 Halaman

## **ALOKASI DANA DESA – PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 06, BD. 2016/NO.170 : 9 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan dana desa di dalam Peraturan Bupati.
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang antara lain meliputi prinsip dan sumber anggaran ADD, tata cara pembagian dan penetapan, perhitungan alikasi formula, pengelolaan ADD yang meliputi penyaluran, pencairan dna penatausahaan, Pelaporan, dan Sanksi.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2016.
  - Lampiran 16 Hlm.

## **PEMBAYARAN UANG MAKAN DAN MINUM HARIAN – PENEGAKAN DISIPLIN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO.08 BD. 2016/NO.172 : 8 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN DAN MUNUM HARIAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka mendukung penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan untuk efisiensi efektifitas pemanfaatan uang makan dan minum harian PNS, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
  - Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang no 6 Tahun 2000; Undang-Undang no 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan disiplin PNS, ketentuan hari dan jam kerja, penjatuhan hukuman disiplin, pembayaran dan pemotongan uang akan dan munum harian, tata cara pemotongan uang makan minum harian serta Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2016.

## **PENGELOLAAN UANG DAERAH**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 18, BD. 2016/NO.182 : 14 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk tertib pengelolaan dan pemanfaatan uang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatur pedoman pengelolaan uang milik daerah.
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005;.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pokok pengelolaan keuangan daerah; tugas dan fungsi Bendara Umum Daerah; Penambahan dan Pengurangan Uang Darah; pengelolaan rekening milik BUD dan Rekening SKPD; bunga dan jasa giro, penerimaan pemerintah daerah, mekanisme Uang Persediaan SKPD; mekanisme pengelolaan kekurangan/kelebihan kas; pertanggungjawaban dan pelaporan uang daerah; pengawasan pengelolaan uang daerah; dan sanksi
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2016.  
Ketenauan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati

## **PENDAFTARAN PENDATAAN PENETAPAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 21, BD. 2016/NO.185 : 32 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENDAFTARAN PENDATAAN PENETAPAN PEMBAYARAN PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Daerah, maka diperlakukan petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam operasionalnya sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat.
  - Undang-Undang 6- Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomo4 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak; tata cara penggunaan nota pesanan atau bon pejualan dan tiket masuk; tata cara pemungutan pajak daerah; pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah; Masa Pajak yakni satu bulan penuh (kecuali pajak reklame); penetapan pajak; tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran; tata cara penagihan pajak; pemberhentian sementara usaha; tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan pajak, pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan Banding; pengembalian kelebihan pembayaran; ketentuan pidana dan bentuk formulir perpajakan.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Januari 2016.  
Lampiran 12 Halaman

## **PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PERGURUAN TINGGI**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 22, BD. 2015 : 15 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA/MAHASISWI LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MAUPUN SWASTA**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan untuk memacu semangat belajar para siswa/siswi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/MA/SMK dari kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Perguruan Tinggi.
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Asas pemberian beasiswa, Kriteria Penerimaan Bantuan Beasiswa; Hak dan Kewajiban Mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan beasiswa; besaran bantuan beasiswa; prosedur penyaluran bantuan beasiswa, sumber dana dan ketentuan berhentinya bantuan beasiswa, serta sanksi.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



## **PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 26, BD. 2016/NO.190 : 26 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

- ABSTRAK :**
- Untuk menjamin terciptanya tertib administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial serta mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
  - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Bentuk Hibah dan Bantuan Sosial, Penerima Hibah, Kriteria dan Persyaratan, Permohonan, Verifikasi, Penganggaran, Penetapan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pencairan dan penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan pencatatan, dan kewajiban Audit atas hibah dan bantuan sosial oleh Inspektorat Kabupaten serta Monitoring dan Evluasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2016.
- Lampiran 15 Halaman

## **PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 38, BD. 2015/NO.202 : 11 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu diatur pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan Bupati.
  - Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Presiden 51 Tahun 2016; Permengadri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Sistem Pengaduan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang yang menyimpang dari RTRW, RDTRK, atau RTBL, mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat; dan indikasi pencemaran terhadap lingkungan pemukiman, sumber pengaduan; bentuk pengaduan, manfaat dan prinsip pengelolaan pengaduan, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan ( melalui Unit Layanan Pengaduan); Pembinaan Penataan Ruang; Perizinan, Sanksi.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2016.

## **SISTEM EVALUASI TERPADU ULP**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 47, BD. 2016/NO. 211 : 8 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG SISTEM EVALUASI TERPADU DAN BERKELANJUTAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja secara terpadu dan berkelanjutan terhadap kinerja Kelompok Kerja (Pokja)mULP dalam menghasilkan pemenang lelang yang berkualitas pada ULPD Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Evaluasi Terpadu dan Berkelanjutan.
  - ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prinsip dan Kewenangan evaluasi terpadu dan berkelanjutan atas ULP, Fokus Evaluasi; Tim Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tata Cara dan Waktu Evaluasi; dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 September 2016.

## **RETRIBUSI DAERAH – TATA CARA PEMUNGUTAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 49, BD. 2016/NO.213 : 7 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah lebih khusus pada sektor retribusi, maka perlu dibuat kebijaksanaan tentang tata laksana pengelolaan retribusi Daerah.
  - Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi antara lain mencakup Objek Retribusi yang terdiri dari Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu; Tata cara Penetapan Teribusi (berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD), Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan;
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 September 2016.

## **PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 57, BD. 2015/NO. : 10 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa secara swakelola yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif dan transparan.
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prinsip dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa, batasan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, pelaksana pekerjaan swakelola, rencana pelaksanaan, pelaksanaan pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **FUNGSI AKUNTANSI – SOP**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 59, BD. 2015/NO.223 : 17 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PERCEPATAN FUNGSI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government), Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat perlu mempercepat fungsi akuntansi Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditetapkan pedoman dalam menjalankannya.
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan fungsi akuntansi pemerintah daerah; SOP Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP); SOP SPM Ganti Uang; SOP SPM Tambahan Uang (TU); SOP SPM TU Nihil; SOP SPM Langsung Gaji dan Tunjangan; SOP SPM Langsung Honorarium;; SOP SPM Langsung Tambahan Penghasilan; SOP SPM Langsung Barang; SOP SPM Langsung Konstruksi; SOP SPM Langsung Jasa;
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2016.

## **DANA DESA – PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN – PERUBAHAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 61, BD. 2016/NO.225 : 5 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomr 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016.
  - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas ketentuan sebelumnya yakni pada mekanisme dan pentahapan penyaluran dana desa serta pencairan dana desa.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2016

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA– PERUBAHAN**

**2016**

**PERBUP MALUKU TENGGARA BARAT NO. 62, BD. 2016/NO.226 : 6 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  - Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas ketentuan sebelumnya yakni pada penambahan bab VII tentang pengorganisasian yang meliputi tugas dan fungsi Tim-Tim Pengorganisasian fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan DD dan ADD yang terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten Tim Pendamping Kecamatan dan Pelaksana Kegiatan Desa.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2016